

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang akuntabilitas *output* dalam perencanaan penganggaran dan kinerja pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Output* yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2017 masih belum sepenuhnya menjamin kesesuaian informasi kinerja antara indikator kinerja dengan *output* yang dihasilkan.  
Perbedaan satuan volume pada level *output* dan indikator kinerja dengan pekerjaan riil yang dilakukan mengakibatkan sulitnya mengukur kinerja kementerian lembaga secara akurat.
2. Berbagai kendala dalam menyusun *output* lebih banyak disebabkan oleh:
  - a) Rumit dan banyaknya peraturan dan format dokumen yang harus diikuti.
  - b) Komitmen manajemen yang rendah dalam mematuhi target sasaran yang telah ditetapkan serta tuntutan untuk membiayai struktur organisasi yang ada menjadi salah satu kendala utama dalam penentuan *output*.
  - c) Dijadikannya penyerapan anggaran menjadi salah satu tolok ukur kinerja menjadikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cenderung mengalokasikan sebagian besar dana pada kegiatan yang indikator kinerja dan *output* yang mudah untuk dilaksanakan dan diukur seperti pada *Output* Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini adalah :

1. Keterbatasan dalam melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Mengingat waktu penelitian bersamaan dengan kesibukan narasumber dalam proses penyusunan anggaran maka beberapa wawancara dilakukan via *e-mail* dan media komunikasi lain. Secara metodologis wawancara tersebut dimungkinkan namun ada kemungkinan informasi yang didapatkan tidaklah

sebaik jika wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan para narasumber;

2. Mengingat waktu penelitian yang bersamaan dengan proses penyusunan anggaran, serta para narasumber yang sudah sangat memahami permasalahan penganggaran, terkadang fokus wawancara melebar menjadi permasalahan yang sedang menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran secara umum. Hal ini menyebabkan proses analisa data menjadi sedikit lebih rumit karena harus memisahkan informasi yang sangat banyak dengan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

### C. Saran

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja *output* dalam penganggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka disarankan beberapa hal berikut ini :

1. Upaya untuk meningkatkan keterkaitan dan keselarasan antara RPJMN, Renstra, RKP, Renja dan RKAKL/ DIPA dapat dilakukan melalui penyederhanaan dan penyempurnaan terhadap peraturan, terminologi dan format dokumen yang ada. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan pada saat mengaplikasikan perencanaan anggaran ke dalam RKAKL/ DIPA agar sesuai dengan RPJMN, Renstra, RKP, dan Renja.
2. Dalam penyusunan *output* harus berpedoman pada indikator-indikator yang telah disepakati pada *trilateral meeting* dan harus secara jelas mengandung informasi yang mendukung pencapaian kinerja. Sehingga tidak terjadi perbedaan antara indikator kinerja *output* antar dokumen penganggaran. Begitu juga dengan satuan volume pada *output* sebaiknya haruslah sejalan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, karena satuan yang berbeda akan menyulitkan pengukuran kinerja sehingga akan menghasilkan hasil pengukuran kinerja yang bias.
3. Penyerapan anggaran sebaiknya tidak lagi dijadikan sebagai ukuran kinerja yang utama, tapi lebih fokus pada pencapaian kinerja non keuangan.

4. Perlu meningkatkan keterlibatan pimpinan atau manajemen tertinggi secara lebih awal dalam proses perencanaan khususnya dalam menetapkan indikator kinerja dan *output* suatu Kementerian Lembaga.
5. Kementerian Keuangan dan Bappenas haruslah membuat batasan tentang besaran alokasi dana yang dapat dialokasikan untuk *Output* Layanan.
6. Dalam kegiatan *trilateral meeting* sebaiknya semua kegiatan prioritas dibahas bersama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan.

